

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah merupakan kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Tujuan dari otonomi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, memanfaatkan sumber daya yang ada, dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban dalam mengelola keuangan daerah dan menggali potensi lokal untuk meningkatkan pendapatan daerah demi mewujudkan kemandirian daerah.

Pemerintah daerah perlu membuat perencanaan dan penggaran karena anggaran digunakan untuk mengarahkan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Maka dari itu, pemerintah daerah memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mengurus keuangannya dalam setiap program atau kegiatan yang ingin menjalankannya. Dengan adanya APBD pemerintah daerah juga dapat memperkirakan setiap pengeluaran yang dilakukan apakah cukup dengan pendapatan yang dimiliki daerah dengan kata lain setiap pemasukan dan pengeluaran daerah akan terperinci. Anggaran diperlukan karena kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Kebutuhan tersebut terus berkembang namun sumber daya yang ada terbatas. Oleh sebab itu, setiap daerah harus meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, Restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Sumber pendapatan daerah lainnya juga adalah Dana

Alokasi Umum (DAU) yang termasuk kedalam bagian dari dana perimbangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah (Siregar,2017:32). PAD memiliki peran yang cukup penting dalam menentukan kemampuan daerah dalam melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Besar kecilnya hasil PAD dapat menentukan apakah daerah tersebut sudah mandiri atau masih tergantung pada pemerintah pusat. Semakin besar PAD maka semakin besar juga kemampuan daerah dan semakin berkurang ketergantungan pada pemerintah pusat.

Dengan adanya otonomi daerah berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam mengelola daerahnya sendiri tak terkecuali juga mandiri dalam mengelola keuangan daerah. Meski begitu pemerintah pusat tetap memberi dana bantuan yaitu berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan kepada pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rapat pelaksanaan desentralisasi (Halim, 2008 : 323).

Dalam mengelola suatu daerah juga membutuhkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DAK dialokasikan untuk membantu daerah menandai kebutuhan fisik sarana dan prasarana yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur seperti jalan irigasi dan air bersih, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup (Yani, 2008).

Dalam pengelolah keuangan daerah pasti terdapat belanja modal, pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode (Murysidi, 2014). Belanja modal dapat di klarifikasikan menjadi belanja tanah, belanja modal peralatan atau mesin, belanja modal jalan irigasi dan jaringan, belanja modal bangunan atau gedung, belanja

modal fisik lainnya yang merupakan biaya/pengeluaran yang difungsikan sebagai pengadaan (Abdul dan Muhammad, 2012).

Pada perkembangannya banyak daerah yang tingkat kemandirian pemerintah daerahnya justru tidak mengalami peningkatan bahkan cenderung mengalami penurunan. Pemerintah daerah justru lebih menggantungkan diri pada DAU untuk membiayai belanja modalnya. Jika DAU semakin meningkat maka semakin mendorong pemerintah daerah melakukan belanja modal lebih besar. DAU yang meningkat akan membuat pemerintah daerah menjadi malas dalam meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat lebih besar juga sehingga daerah tersebut juga tidak akan mandiri. Daerah tentu saja lebih memilih mengupayakan DAU lebih besar daripada harus bekerja keras agar terjadi peningkatan PAD yang dapat mengakibatkan pengurangan DAU. DKI Jakarta adalah ibukota Negara dan kota terbesar di Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Dahulu pernah dikenal dengan beberapa nama diantaranya Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Di dunia internasional Jakarta juga mempunyai julukan J-Town, atau lebih populer lagi The Big Durian karena dianggap kota yang sebanding New York City (Big Apple) di Indonesia. Jakarta sebuah provinsi di Indonesia yang lahir pada tanggal 22 Juni 1527. Seiring dengan munculnya pemekaran wilayah yang berkenaan dengan Otonomi Daerah di Era Reformasi, Provinsi ini kemudian dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.29 Tahun 2007, pada Tahun 1961, Jakarta mendapat status “Daerah Khusus Ibukota”. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang terdiri dari 1 kabupaten administrasi dan 5 kota administrasi. Potensi yang dimiliki provinsi ini seperti pariwisata, pertanian, perikanan, industry dan energy sudah cukup baik namun masih perlu menggali potensi lagi agar dapat melaksanakan Otonomi Daerah yang baik serta dapat membiayai belanja modal yang semakin meningkat setiap tahunnya sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014.

Dari uraian latar belakang masalah diatas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana

Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 -2016”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di provinsi DKI Jakarta?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja modal pada kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta?
4. Bagaimana pengaruh PAD, DAU dan DAK secara bersama-sama terhadap Belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah membahas berpengaruh atau tidak berpengaruhnya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), terhadap Belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta tahun 2012-2016.

1.4. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta.
- 2 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta.

- 3 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta.
- 4 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan wawasan dan mengasah kemampuan tentang pengetahuan, wawasan dan mengasah kemampuan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal serta sebagai wadah untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini di harapkan dapat memberi masukan mengenai seberapa besar Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada para pembaca tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari judul permasalahan yang penulis angkat. Terdapat juga rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang mendukung tugas akhir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, populasi dan prosedur penentuan sampel populasi, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, identifikasi variabel, teknik analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang isi dari penelitian yang terdiri dari hasil pengumpulan data, pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dibuat serta memberikan saran-saran yang diusulkan untuk mengembangkan lebih lanjut untuk mencapai hasil yang lebih baik.

